

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Tujuan Pembangunan Nasional berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pembangunan merupakan salah satu cara untuk mencapai keadaan tersebut. Selama ini pembangunan selalu diprioritaskan pada sektor ekonomi, sedang sektor lain hanya bersifat menunjang dan melengkapi sektor ekonomi. selain memberi dampak positif pembangunan juga memberi dampak negatif terutama yang berkaitan dengan berbagai masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja. Pembangunan merupakan proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Proses pembangunan ekonomi biasanya tidak hanya ditandai dengan terjadinya perubahan pada struktur permintaan serta penawaran barang dan jasa yang diproduksi. Namun pembangunan ekonomi juga ditandai dengan terjadinya perubahan struktur penduduk dan ketenagakerjaan (Susanti, 2000). Tingginya penawaran tenaga kerja tidak diiringi dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi.

Perlu adanya Perluasan penyerapan tenaga kerja yang diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk kepasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kemudian, meningkatnya angka pengangguran akan mengakibatkan pemborosan sumber daya dan potensi angkatan kerja yang ada, meningkatnya beban masyarakat, merupakan sumber utama kemiskinan dan mendorong terjadinya peningkatan keresahan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Depnakertrans, 2004). Masalah yang dihadapi ketenagakerjaan meliputi, pertumbuhan jumlah penduduk tiap tahun, menyebabkan jumlah angkatan kerja juga meningkat. Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut, jika tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai, tentunya akan menciptakan pengangguran. Masalah pengangguran tersebut merupakan masalah yang serius dalam bidang ketenagakerjaan karena pengangguran telah lama dipandang sebagai penyebab utama kemiskinan. Oleh karena itu, penduduk yang besar dan terus bertambah tiap tahunnya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangunan, terutama penempatan tenaga kerja sebagai salah satu modal pembangunan.

Penyerapan tenaga kerja secara tidak langsung dipengaruhi oleh investasi, baik investasi penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Menurut Sukirno (2012: 121), investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk

menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Penanaman modal dalam bentuk investasi akan memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, bentuk investasi umumnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu investasi yang dilakukan oleh pemerintah/swasta dan investasi oleh pihak luar negeri. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah/swasta lebih dikenal dengan sebutan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), sedangkan investasi dari pihak luar negeri dikenal dengan sebutan PMA (Penanaman Modal Asing).

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu kota besar yang ada di Indonesia yang dikenal sebagai “kota pelajar”. Banyak pendatang dari berbagai kota diluar Yogyakarta yang masuk ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), baik untuk menuntut ilmu maupun untuk bekerja. Tidak heran, jika seperti kota-kota lain. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga mempunyai masalah ketenagakerjaan yang serius. Dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta jumlah penduduk 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan usaha utama di D.I. Yogyakarta, 2000-2014. Menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja pada setiap tahunnya mengalami penurunan dan kenaikan dikarenakan imbas dari naik turunnya siklus ekonomi yang tidak stabil.

**Tabel 1.1**

**Penduduk 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan usaha utama di D.I. Yogyakarta, Tahun 2000-2014**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah tenaga kerja</b>
2000	1.663.503
2001	1.645.799
2002	1.610.530
2003	1.620.115
2004	1.701.802
2005	1.757.702
2006	1.754.950
2007	1.835.542
2008	1.892.205
2009	1.895.648
2010	1.775.148
2011	1.798.595
2012	1.867.708
2013	1.886.071
2014	1.956.043

*Sumber: BPS Yogyakarta, diolah*

Kondisi ideal dari pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan tenaga kerja adalah ketika pertumbuhan ekonomi mampu mengubah penggunaan tenaga kerja secara lebih besar (Dimas, 2009). Secara tidak langsung permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh investasi. Invesatai dibagi menjadi dua (2) yaitu PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).

Diketahui pada tabel 1.2 menunjukkan data perkembangan jumlah investasi baik PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) terlihat bahwa nilai investasi mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini dikarenakan adanya masalah keamanan, tidak adanya kepastian hukum, dan kondisi infrastruktur yang buruk, hingga kondisi perburuhan yang semakin buruk.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan nilai investasi PMA dan PMDN provinsi DIY**  
**tahun 2000-2014**  
**(dalam rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah penanaman modal asing (PMA)</b>	<b>Jumlah penanaman modal dalam negeri (PMDN)</b>
2000	960.781	1.815.183
2001	220.966	1.884.596
2002	27.798	1.961.732
2003	30.668	2.405.275
2004	295.761	2.401.967
2005	475.732	2.251.066
2006	496.117	2.114.879
2007	880.382	1.801.534
2008	17.118.923	1.806.426
2009	1.025.182	1.882.514
2010	1.199.660	1.884.926
2011	3.873.176	2.310.271
2012	4.250.123	2.805.945
2013	5.203.116	2.864.654
2014	5.955.854	3.568.546

*Sumber : BPS DIY (tahun 2000-2014), data diolah*

Menurut (Sukirno, 2000), kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat pendapatan nasional, maka peningkatan ini akan selalu diikuti oleh penambahan dalam kesempatan kerja.

Selain itu, upah merupakan tujuan dari setiap tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam penerapan upah didaerah dengan menggunakan kebijakan Upah Minimum untuk sektor formal. Menurut Devanto dan Putu (2011) bahwa Upah Minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981 Upah Minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral, meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah. Dalam hal ini upah minimum adalah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Namun dalam peraturan pemerintah yang diatur secara jelas hanya upah pokoknya saja dan tidak termasuk tunjangan, sehingga seringkali menimbulkan kontroversi bagi pengusaha dan pekerja. Tunjangan tetap sendiri adalah tunjangan yang diberikan secara tetap tanpa melihat tingkat kehadiran pekerja ataupun output, seperti misalnya tunjangan keluarga tetap dan tunjangan yang berdasar pada senioritas.

Perkembangan tingkat Upah Minimum dapat dilihat pada Tabel 1.3 menunjukkan dari tahun 2000 sampai tahun 2014 upah minimum mengalami kenaikan yang terus menerus dengan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2014.

**Tabel 1.3**

**Perkembangan Upah Minimum (Tahun 2000-2014)**

**(Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Upah Minimum</b>
2000	194.500
2001	237.500
2002	321.800
2003	360.000
2004	365.000
2005	400.000
2006	460.000
2007	460.000
2008	586.000
2009	700.000
2010	745.694
2011	808.000
2012	892.660
2013	947.114
2014	988.500

*Sumber: BPS DIY (tahun 2000-2014)*

Studi Wais grais (2003), menemukan bahwa kebijakan upah minimum menghasilkan efek positif dalam hal mengurangi kesenjangan upah yang terjadi pasar tenaga kerja.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diadakan penelitian mengenai faktor apa dan bagaimana faktor tersebut mempengaruhi penyerapan tenaga kerja diprovinsi DIY. Adapun judul yang dipilih adalah : **“ANALISIS PENGARUH INVESTASI, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DIPROVINSI DIY (TAHUN 2000-2014)”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor penanaman modal luar negeri (PMA) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja diProvinsi DIY?
2. Apakah faktor penanaman modal dalam negeri (PMDN) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja diProvinsi DIY?
3. Apakah faktor pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja diProvinsi DIY?
4. Apakah faktor upah minimum berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja diProvinsi DIY?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis pengaruh penanaman modal asing (PMA) terhadap penyerapan tenaga kerja diProvinsi DIY



- b. Menganalisis pengaruh penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap penyerapan tenaga kerja diProvinsi DIY
- c. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja diProvinsi DIY
- d. Menganalisis pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja diProvinsi DIY

### **1.3.2 Manfaat**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan masalah penyerapan tenaga kerja diProvinsi DIY.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu ekonomi khususnya yang berkaitan dengan teori penyerapan tenaga kerja.
- c) Membantu memberikan informasi bagi peneliti lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian yang sama.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **Bab I Pendahuluan**

Membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **Bab II Kajian Pustaka**

Menguraikan tentang teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang akan dibahas dan hipotesis yang akan diuji.

### **Bab III Metode Penelitian**

Membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data guna untuk mencapai tujuan penelitian.

### **Bab IV Hasil dan Analisis**

Menguraikan tentang gambaran umum obyek penelitian, gambaran singkat variabel penelitian, analisis data, dan pembahasan mengenai hasil analisis dari obyek penelitian.

### **Bab V Simpulan dan Implikasi**

Bab ini akan menyajikan secara singkat simpulan dan implikasi yang diperoleh dalam pembahasan.

